

Pendidikan Nilai Pancasila



**Aluisius Dwi Rachmanto
Andreas Doweng Bolo
Bartolomeus Samho
Deny Rismansyah
Stephanus Djunatan
Sylvester Kanisius L
Y. Slamet Purwadi
Yustinus Doman**

19.12.11

R

PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

Penyusun:

- A. Dwi Rachmanto
- Andreas Doweng Bolo
- Bartolomeus Samho
- Deny Rismansyah
- Stephanus Djunatan
- Sylvester Kanisius L
- Y. Slamet Purwadi
- Yustinus Doman



320.5
PEN



21 Okt 2011

R

131863 SB (PD11
19.12.11 -

UNPAR PRESS

PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

Copyright © Y. Slamet Purwadi, dkk.

Penyunting: A. Dwi Rachmanto

Cetakan I,

Diterbitkan oleh Unpar Press

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

Telp. (022) 2032655 ext. 144 dan 148 - Faks. (022) 2034847

e-mail: lppm@home.unpar.ac.id

Desain Sampul: Jenal Abidin

Desain Isi: Denny Rismansah

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Andreas, A. Dwi Rachmanto

Pendidikan Nilai Pancasila—Penulis: Y. Slamet Purwadi, dkk

Penyunting: A. Dwi Rachmanto/Bandung: Unpar Press, Juni/2007

175 halaman, i -viii, 16,5 x 24,5 cm.

ISBN: 978-979-25-5133-4

1. Nilai Pancasila, Pendidikan

I. Judul

II. Purwadi, Slamet, dkk.

PENGANTAR PENERBIT

Kebutuhan untuk menerbitkan sebuah buku ajar berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Katolik Parahyangan merupakan hal yang penting. Sedemikian pentingnya karena kebutuhan tersebut bukan saja melihat bagaimana situasi sosial politik pasca Orde Baru dimana tafsir terhadap Pancasila menjadi sedemikian berkembang, terbuka dan beragam, tetapi juga bagaimana proses pendidikan dan pengajaran nilai-nilai Pancasila juga dapat berlangsung tanpa melupakan akar dari Pancasila itu sendiri.

Di masa sekarang banyaknya cara untuk memahami Pancasila yang semakin berkembang, terbuka dan beragam tersebut tidak saja berlangsung dalam perspektif politik tetapi juga berlangsung dalam dunia akademik. Bagaimanakah sesungguhnya untuk dapat memahami Pancasila tidak saja berdasarkan kajian kontemporer tetapi juga mengetahui akar historis, definisi legal dan bahkan aspek sosiologisnya pun menjadi sebuah keinginan bagi para dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila di mana saja untuk bisa menjawab segala hal yang muncul sebagai bagian dari diskursus selama perkuliahan.

Sejalan dengan hal tersebut, buku ini memberikan sebuah kerangka berupa kerangka filosofis sebagai sebuah penyamaan persepsi awal tentang bagaimana Pancasila sebagai nilai dapat dipahami dan ditularkan kepada para mahasiswa tidak saja sebagai sebuah pemahaman teoritis belaka tetapi juga gambaran tentang kehidupan yang lebih luas dan umum berkaitan dengan keragaman dan persatuan, khususnya di dalam civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan.

PENGANTAR PENULIS

Awalnya hanya merupakan sebuah wacana yang kemudian berkembang menjadi cita-cita para dosen Pendidikan Pancasila di Pusat Kajian Humaniora, Unpar, untuk membuat sebuah buku ajar Pendidikan Pancasila. Buku ajar ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi materi di antara para dosen selain mempermudah mahasiswa menginventarisir dan mendata materi perkuliahan yang diberikan. Sebutan 'buku ajar' mengimplikasikan bahwa buku ini merupakan sebuah upaya menafsirkan falsafah negeri yang berkembang di lingkungan Perguruan Tinggi umumnya dan UNPAR khususnya.

Buku ajar Pendidikan Pancasila ini lebih menggunakan pendekatan filosofis-akademik yang mencoba memetakan kembali kerangka berpikir filsafat tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Orientasi materi dalam buku ajar ini lebih kepada praksis nilai dalam kehidupan sehari-hari. Tidaklah mengherankan bila pandangan para filsuf klasik maupun modern, menjadi landasan berpikir dan argumentasi setiap bagian atau bab dalam buku ajar ini.

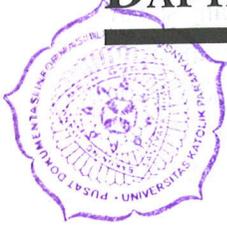
Kami juga mengakui bahwa tidak semua materi tentang Pancasila terakomodasi dalam buku ajar ini. Hanya materi-materi yang kami pandang penting menjadi bagian pembahasan dalam buku ajar ini. Karenanya, buku ajar ini memberikan semacam kerangka filsosofis global tentang Pancasila, perspektif yang mendasarinya, nilai-nilai yang menyertainya, dan bagaimana praksis nilai tersebut dalam kehidupan yang riil. Sehingga, tepatlah buku ajar ini dapat juga membantu para dosen maupun mahasiswa di manapun yang berminat mendalami dan memperkaya khazanah pengetahuannya tentang Pancasila.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pengelana ilmu; para rekan dosen di Pusat Kajian Humaniora, UNPAR, yang telah

turut memberikan kritik dan saran selama proses diskusi dan penyempurnaan substansi materi dalam buku ajar ini. Juga para rekan mahasiswa yang secara tidak langsung dalam proses perkuliahan telah turut membantu memperkaya buku ajar ini. Akhirnya, terima kasih juga kepada UNPAR PRESS yang telah berkenan menerbitkan buku ajar ini. Semoga buku ajar ini semakin memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang Pancasila, nilai-nilai yang dianutnya, dan praksisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — iii

PENGANTAR PENULIS — iv

DAFTAR ISI — vi

BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN NILAI PANCASILA — 1

A. Pendahuluan — 1

B. Pendekatan Interpretatif dalam Pendidikan
Nilai Pancasila — 1

C. Tujuan Kuliah Pendidikan Nilai Pancasila — 4

D. Metode Kuliah Pendidikan Nilai Pancasila — 5

E. Nilai-Nilai Pancasila — 9

F. Medan Kajian Pendidikan Nilai Pancasila — 14

G. Penutup — 17

BAB II NILAI FILOSOFIS SILA I: KETUHANAN YANG MAHA ESA — 19

A. Pendahuluan — 19

B. Konsep Ketuhanan dalam Dinamika Filsafat — 20

C. Sekilas Sejarah Lahir Sila I dan Konsep-Konsep
yang Mendasari — 27

D. Hubungan Negara dan Agama — 31

E. Penutup — 37

**BAB III NILAI FILOSOFIS SILA II:
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB — 39**

- A. Pendahuluan — 39
- B. Landasan Pemahaman Tentang Konsep Kemanusiaan — 40
- C. Dinamika Paham Kemanusiaan di Indonesia — 48
- D. Tantangan Kemanusiaan Universal Abad XXI — 53
- E. Tujuh Prinsip Kemanusiaan — 58
- F. Penutup — 63

**BAB IV NILAI FILOSOFIS SILA III:
PERSATUAN INDONESIA — 65**

- A. Pendahuluan — 65
- B. Sekilas Pengertian Persatuan Indonesia — 66
- C. Paham Kebangsaan — 67
- D. Nasionalisme sebagai Nilai — 77
- E. Dinamika Kebangsaan Indonesia — 80
- F. Penutup — 91

**BAB V NILAI FILOSOFIS SILA IV:
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN — 93**

- A. Pendahuluan — 93
- B. Paham dan Konsep Demokrasi — 95
- C. Corak Tuntutan Demokrasi dalam Praksis — 111
- D. Dinamika Demokrasi di Indonesia — 113
- E. Tantangan Demokrasi — 117
- F. Penutup — 130

**BAB VI NILAI FILOSOFIS SILA V:
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA — 133**

- A. Pendahuluan — 133
- B. Makna Keadilan — 134
- C. Dua Legitimasi Keadilan — 135
- D. Ruang Lingkup Keadilan — 137
- E. Pandangan *Founding Fathers* tentang
Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Sosial — 140
- F. Ketidakadilan Sosio-Ekonomi dan Politik — 142
- G. Keadilan Sosial dan Pemerataan — 146
- H. Prinsip-Prinsip Etis Pembangunan — 148
- I. Penutup — 150

DAFTAR PUSATKA --- 153

TENTANG PENULIS — 159

Bab I



PENGANTAR PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Pentingnya Pendidikan Nilai Pancasila saat ini terletak pada pembangunan dan pengembangan karakter dan bangsa (*character and nation building*). Nilai-nilai yang dikandung sila-sila Pancasila melandasi Pendidikan Nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita menggunakan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila.

Sementara itu, inventarisasi wacana akademik tentang Pancasila paling tidak mencantumkan tiga macam pendekatan interpretatif terhadap nilai-nilai Pancasila¹. Pendekatan interpretatif ini muncul dalam bentuk aliran pemikiran mengenai Pancasila. Ketiga pendekatan yang dimaksud sebagai berikut.

B. PENDEKATAN INTEPRETATIF DALAM PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

Pendekatan interpretatif yang *pertama* bersifat **moral-yuridis**. Pendekatan ini sangat dominan sejak masa revolusi kemerdekaan Tahun 1945. Tokoh pendekatan ini berasal dari kelompok kebangsaan, seperti Ir. Soekarno, Muh. Yamin, Mr. Soepomo (dalam masa Revolusi Kemerdekaan), Prof. Dr. Notonegoro (dalam masa orde Baru). Pendekatan interpretatif ini menempatkan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum”. Pancasila adalah legitimasi yuridis, atau dasar terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Dasar Negara dan sumber hukum, tentu saja Pancasila menjiwai Pembukaan UUD 1945. Konteks ini disebut *Prof. Dr. Notonegoro* sebagai kaidah dasar negara (*staats-fundamenteaal norm*).

¹ Bandingkan A.M.W Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, Hlm 281 – 288

Pendekatan ini seringkali disebut juga *arus ilmiah-akademik*. Dalam arus pemikiran ini dibicarakan Pancasila sebagai legitimasi berdirinya NKRI. Konteksnya Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh norma dan rumusan hukum positif di Indonesia dibuat berdasarkan kaidah dasar negara ini. Arus moral yuridis menempatkan Pancasila sebagai kaidah dasar yang mengesahkan berdirinya NKRI. Konsekuensinya jika kaidah dasar ini diganti, bangunan negara di atasnya juga harus berubah.

Dalam perkembangannya, arus inilah yang kuat berkembang. Langkah ini dipicu dan dipacu orde baru dengan jargonnya “mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Persoalannya adalah landasan norma fundamental ini dipakai negara untuk menuntut kesetiaan para warganya terhadap negara. Dengan membakukan Pancasila sebagai asas tunggal negara di era 80-an melalui parlemen dan pemerintah, langkah legitimasi negara semakin kuat. Langkah ini memberi kekuasaan pada pemerintah untuk mengadakan interpretasi tunggal yang bernuansa legalistik atas kaidah dasar negara ini. Warganegara dalam hal ini “diarahkan” mengikuti dan mewujudkan interpretasi tunggal ini dalam rupa “P4” dan “Butir-Butir Pengalaman Pancasila”. Dalam hal ini bisa dinyatakan arus ini disebut sebagai jalur Legal-Yuridis bagi NKRI.

Kedua, pendekatan interpretasi Pancasila yang bernuansa **sosialistik dan marxistik**. Tokohnya misalnya Asmara Hadi². Pendekatan ini mengedepankan ajaran sosialisme dan marxisme dalam menginterpretasikan Pancasila. Pendekatan sosialistik dan marxistik ini sempat menguat pada era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966).

Ketiga, pendekatan interpretatif yang bercorak **humanistik**. Pendekatan ini dapat disebut aliran Humanistik. Selain, Ir Soekarno, tokoh pendekatan ini misalnya: Ki Hadjar Dewantara³, Prof. Dr. N. Drijarkara, S.J., dan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo. Ir. Soekarno kerap kali menegaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia⁴. Dalam pendekatan ini, Pancasila merupakan kerangka berpikir untuk mengenali dan mengembangkan jatidiri, perilaku dan sikap orang Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Aliran pemikiran ini tidak melulu menempatkan Pancasila sebagai legitimasi yuridis atas berdirinya NKRI.

² Lihat AMW Pranarka, *Op.Cit.*, hlm. 286. Judul buku Asmara Hadi, *Tiang Negara Yang Lima*

Kemudian, Prof. Dr. N. Drijarkara, S.J., secara eksplisit mengembangkan Pancasila sebagai pemikiran humanistik, yakni pemikiran tentang keberadaan manusia Indonesia (esensi dan eksistensinya). Namun, Prof. Dr. N. Drijarkara, S.J., sendiri tidak secara eksplisit merumuskan eksistensi dan esensi tersebut. Secara implisit, dia hanya mengaitkan nilai-nilai sila Pancasila dengan pandangan humanistik. Demikian pendapatnya:

*Pancasila adalah inheren (melekat) kepada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada konkretnya. Sebab itu, dengan memandang kodrat manusia 'qua talis', kita juga akan sampai ke Pancasila*⁵.

Pendapat Prof. Dr. N. Drijarkara, S.J., menyatakan Pancasila secara inheren ada dalam kodrat manusia. Maksudnya Pancasila *sudah dikandung* dalam diri setiap orang tanpa terkecuali.

Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo menggarisbawahi pernyataan Soekarno bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Isi jiwa bangsa tersebut terletak pada kehidupan manusia. Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo menekankan esensi manusia sebagai mahluk sosial. Karena itu, istilah yang digunakan untuk esensi ini adalah “kekeluargaan”⁶.

Menurut para pemikir di atas, nilai-nilai Pancasila memberi inspirasi dan menjadi acuan bagi pengembangan kemanusiaan orang Indonesia. Penggalan tersebut akan mengangkat khasanah paradigma dan wacana tentang manusia dari berbagai kebudayaan di Tanah Air. Nilai-nilai tersebut akan berfungsi sebagai “pisau bedah” untuk mengerti dan memahami fenomena-fenomena kemanusiaan orang Indonesia di zaman ini. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk menganalisa berbagai bentuk pengalaman kita dalam rangka merumuskan, membangun dan mengembangkan karakter manusia Indonesia.

³ *Ibid.*, judul buku yang ditulis Ki Hadjar Dewantara: *Peri Kemanusiaan Pantja Sila Menggambarkan Keluhuran Sifat Manusia*. Lih juga. Kumpulan karangan Mr. Soediman Kartohadiprodjo, 1983, *Beberapa Pikiran sekitar Pancasila*. Bandung: Penerbit Alumni.

⁴ Bandingkan Soekarno, 1964. *Tjamkan Pantja Sila* hlm 78, 102 – 104) Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila 1 Djuni 1945 – 1 Djuni 1964.

⁵ Seperti dikutip oleh Hardono Hadi, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius. Hlm. 96.

⁶ Mr. Soediman Kartohadiprodjo, 1983, *Beberapa Pikiran sekitar Pancasila*, Bandung: Penerbit Alumni. hlm 42 – 44

Opsi pendekatan humanistik dalam Pendidikan Nilai Pancasila ini menentukan juga tujuan dan metode pembelajaran Pancasila. Ini penting mengingat nilai-nilai Pancasila tidaklah gamblang diketahui apalagi dipahami. Karena itu kita hendak mempelajari nilai-nilai itu dengan dua langkah. Langkah pertama, melalui pengalaman berhadapan dengan pelbagai peristiwa atau fenomena pribadi dan sosial untuk menemukan makna, yakni nilai-nilai. Langkah berikutnya, kita membaca peristiwa-peristiwa tersebut dengan kaca mata nilai ini. Kedua langkah tersebut merupakan bagian dari metode berpikir yang diberi nama metode hermeneutika. Metode berpikir ini akan menguraikan tujuan kuliah Pendidikan Nilai Pancasila.

C. TUJUAN KULIAH PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

Tiga Pendekatan di atas melatarbelakangi alasan kuliah Pancasila diberikan di tingkat perguruan tinggi. Dalam tingkat perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya mempelajari Pancasila sebagai asas formal dan final atau alasan legitimasi politis bagi NKRI. Pancasila dalam kuliah ini diberikan dalam pendekatan humanistik dengan dua tujuan mendasar.

Tujuan pertama adalah mengajak mahasiswa mempelajari secara kritis Pancasila baik sebagai wacana humanistik. Dengan wacana ini, kami menawarkan sebuah kritik ideologi terhadap Pancasila. Kritik ideologi ini penting mengingat selama ini Pancasila selalu diperlakukan sebagai ideologi. Artinya Pancasila yang awalnya dirumuskan sebagai "*philosophische grondslag* bangsa yang disebut sebagai Indonesia" oleh Ir. Soekarno, telah mengalami proses reduksi sehingga Pancasila "selalu" diperlakukan sebagai dasar negara. Karena alasan ini, kritik ideologi bertujuan membongkar interpretasi tunggal terhadap Pancasila. Interpretasi tunggal selama ini telah menempatkan Pancasila melalui instrumen kepentingan golongan untuk melegitimasi kekuasaannya⁷.

Kedua, kuliah ini mengajak mahasiswa menggali "makna yang tersirat" untuk kemanusiaan orang Indonesia. Makna tersebut dirumuskan saat kita mempelajari sila-sila Pancasila satu persatu. Kita akan menemukan nilai dari sila-sila itu. Artinya, nilai-nilai itu dapat berfungsi ganda: sebagai tujuan final ke mana masyarakat bangsa ini akan menuju dan pisau kritik yang tajam kepada kesadaran kita sendiri dalam konteks sosio-budaya, ekonomis, dan politik. Dengan demikian, pembahasan nilai tersebut membutuhkan berbagai

Ketiga, Pendidikan Nilai Pancasila bertujuan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran mahasiswa peserta didik. Maksudnya, proses pembiasaan nilai ini hendak menyentuh aspek kognitif dan aspek afektif. Mahasiswa mempelajari nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, ia menganalisa peristiwa atau kasus yang terjadi dengan kaca mata nilai kemanusiaan ini. Proses pembelajaran ini menggunakan aspek kognitif. Berikutnya, mahasiswa pun berusaha bersimpati dan berempati dengan para korban atau mereka yang tersisih dalam berbagai peristiwa sosial, ekonomi, budaya dan politik di Indonesia. Mahasiswa belajar untuk mengidentifikasi kondisi non manusiawi baik dalam sistem maupun dalam diri para korban. Dalam proses identifikasi tersebut, mereka mengolah aspek afektif dalam bentuk sikap solider dengan para korban. Aspek afektif ini melengkapi kesadaran akan pentingnya membela dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang tersirat dalam Pancasila.

D. METODE KULIAH PENDIDIKAN NILAI PANCASILA

Untuk mencapai ketiga tujuan Pendidikan Nilai Pancasila di atas, dipilihlah dua metode pendidikan. *Pertama*, metode hermeneutika sebagai alat untuk menggali dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Metode hermeneutika akan menginterpretasi sejarah dan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan budaya. Interpretasi ini penting mengingat nilai Pancasila digali dari sejarah dan peristiwa-peristiwa tersebut. Pada gilirannya, nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila akan digunakan sebagai 'media' untuk menganalisa peristiwa-peristiwa tersebut.

Kedua, metode pendidikan nilai dipilih untuk menginternalisasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Proses internalisasi nilai ini diteruskan dengan usaha merumuskan dan membangun karakter berdasarkan nilai-nilai tersebut.

⁷ Sebagai dasar negara, Pancasila diinterpretasi sebagai sumber hukum. Dalam konteks ini, Pancasila dinyatakan sebagai asas tunggal, ideologi negara satu-satunya. Tentu saja, pelaku interpretasi adalah pihak penguasa yang mempunyai kepentingan-kepentingan politis tertentu. Bandingkan Arief Budiman dalam pengantar buku karya Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, hlm. Xvii, dan AMW Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, hlm. 339.